

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR  
766/PID.B/LH/2017/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Siti Rifatun Nisa'  
NIM. C03215033**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rifatun Nisa'  
NIM : C03215033  
Semester : VIII  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:  
776/pid.b/LH/2017/PN Bpp Tentang Pengangkutan  
Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Rifatun Nisa'

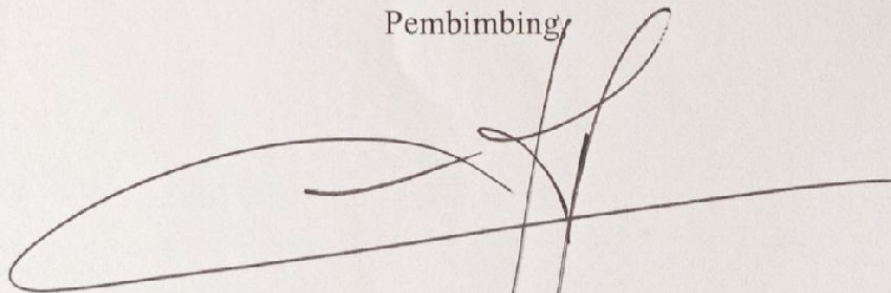
NIM. C03215033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rifatun Nisa' NIM. C03215033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Mei 2019

Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI

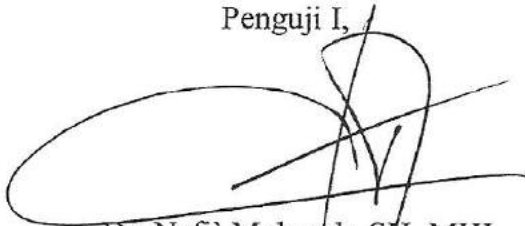
NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Rifatun Nisa' NIM. C03215033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

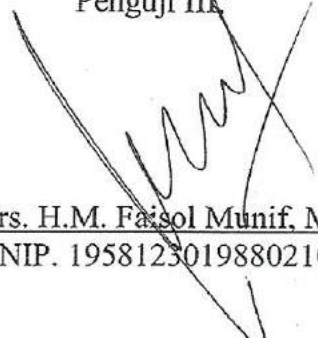
Penguji I,

  
Dr. Nafi Mubarak, SH, MHI.  
NIP. 1974041420080110114

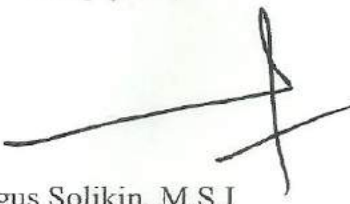
Penguji II,

  
Drs. Ach Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III

  
Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum.  
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

  
Agus Solikin, M.S.I  
NIP.198608162015031003

Surabaya, 29 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Rifatun Nisa'  
NIM : C03215033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [rifatun.nisa96@gmail.com](mailto:rifatun.nisa96@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN NOMOR: 776/PID.B/LH/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Penulis

(Siti Rifatun Nisa')

















































776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan *jarīmah* dalam hukum Pidana Islam yang memuat pengertian *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah* dan Macam-macam *jarīmah* dan sub menguraikan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian, dasar hukum bab kedua

Bab ketiga berisi data penelitian yang memaparkan tentang data dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp. Bab ini terbagi menjadi: (1) deskripsi kasus, (2) keterangan Saksi , (3) dasar hukum, (4) pertimbangan hakim, (5) Putusan.

Bab keempat berisi analisis penelitian yang terdiri dari: (1) putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PNBpp, (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:776/ Pid.B/LH/2017/PNBpp.















































Yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu terdakwa I. Muhammad Yasin Bin Sumali dan terdakwa II. Baharuddin Bin Rusdin dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan para terdakwa untuk bertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan adanya bukti yang diajukan, didapatkan keterangan:

- Bahwa para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Inpres Km.3 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan para terdakwa tertangkap tangan sedang mengangkut



Pasal 12 huruf e tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraiandiatas maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa I Muhammad Yasin Bin Sulami dan terdakwa II. Bharuddin Bin Rusdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Disamping itu Majelis Hakim juga didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;
2. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



4. Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Preematif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif, dan Motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman pidana penjara hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan akan dijatuhkan tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil bagi terdakwa, keluarga dan masyarakat.
6. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nopol KT-8069-YA, Nosin: 3SZDR F9045, Noka: MHKP3CA1JFK101710 serta kunci kontak dan STNK nya.







penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan dan terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya. Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Menurut penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis hakim belum sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam pasal 83 ayat (1) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan yang bentuk stelsel/pidan Kumulatif diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi hakim memutus stelsel/pidana Alternatif dengan hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja tanpa menjatuhkan denda.



















- Salim, *Dasar-dasar hukum kehutanan, Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- Saputra, Fatih Teguh. *Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar yang bermukim di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No: 2615 K/Pid.Sus/2015)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Volime 10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Suhariyono AR. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2012.
- Tim Penyusun. *Al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama Republik Indonesia*. Bandung: CV Media Fitra Rabbani. 2009.
- Wartiningsih. *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan kebijakan kehutanan*. Malang: Setara Press. 2014.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana, Cet I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1997.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/Pid.B/LH/2017/PN Bpp.
- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 251/Pid.B-LH/2018/PN Bpp.